



Judul : Diungkap komisi IV: distribusi pupuk subsidi hadapi tantangan berat
Tanggal : Selasa, 12 Mei 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Diungkap Komisi IV Distribusi Pupuk Subsidi Hadapi Tantangan Berat

WAKIL Ketua Komisi IV DPR Alex Indra Lukman mengungkapkan beratnya beban angkutan logistik, terutama penyaluran pupuk bersubsidi, dalam kondisi saat ini. Selain ada fenomena kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis solar di sejumlah daerah, truk pupuk melalui jalur memutar di sejumlah daerah pascabencana.

Dia mengungkapkan, di Sumatera Barat (Sumbar), truk pengangkut pupuk tak hanya harus mengantre solar, tetapi juga menempuh jalur memutar akibat perbaikan jalan nasional di kawasan Lembah Anai pascabanjir akhir November 2025.

"Angkutan distribusi pupuk subsidi layak diperlakukan setara truk tangki Pertamina yang membawa BBM saat melintas di jalan raya terdampak bencana. Apalagi sekarang marak kejadian antrean di SPBU dalam selang waktu terakhir," ungkap Alex, kepada wartawan, Senin (11/5/2026).

Menurut Alex, langkah tersebut penting untuk mendukung implementasi Permentan Nomor 15 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi. Regulasi baru itu telah memangkas rantai distribusi pupuk dari gudang Pelaku Usaha Distribusi (PUD) di Lini 2 langsung menuju Kios Pupuk Lengkap (KPL) di Lini 4.

"Kini muncul tantangan baru yaitu ketiadaan solar subsidi. Jangan sampai ini jadi faktor penghambat petani mendapatkan pupuk secara tepat waktu di Lini 4, yang merupakan ujung tombak distribusi pupuk subsidi," tegas Ketua PDI Perjuangan Sumbar.

Lini distribusi pupuk dibagi

menjadi empat tahapan. Lini 1 merupakan gudang produsen di pabrik atau pelabuhan. Lini 2 adalah pusat distribusi di tingkat provinsi. Lini 3 berada di tingkat distributor atau penyalur kabupaten/kota. Sedangkan Lini 4 merupakan kios pengecer resmi di tingkat kecamatan atau desa yang menjadi titik akhir distribusi bagi petani.

Alex mengingatkan, distribusi pupuk yang tepat waktu sangat penting karena jadwal pemupukan harus menyesuaikan usia tanaman. Keterlambatan pupuk dikhawatirkan memengaruhi hasil panen dan target swasembada pangan pemerintah.

"Ujungnya akan berimbas pada target swasembada pangan, yang merupakan bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto," terang Ketua Panja Alih Fungsi Lahan Komisi IV DPR.

Ia menambahkan, secara umum stok pupuk subsidi nasional masih aman. Pemerintah juga telah mengatur distribusi berdasarkan wilayah produksi pupuk nasional. Namun diingatkan adanya potensi gangguan pasokan jika konflik di Timur Tengah berkepanjangan. "Karenanya, langkah antisipasi agar pupuk subsidi terjamin ketersediaannya di Lini 4 harus terus diupayakan," tandas Alex.

Pemerintah menetapkan alokasi pupuk subsidi nasional tahun 2026 sebesar 9,8 juta ton. Sebanyak 9,5 juta ton dialokasikan untuk sektor pertanian, terdiri atas Urea 4,4 juta ton, NPK Phonska 4,47 juta ton, NPK Kakao 81 ribu ton, pupuk organik 558 ribu ton, dan ZA 16,4 ribu ton. ■ BYU